

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaringan jalan sebagai prasarana transportasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung terciptanya aksesibilitas arus manusia, barang dan jasa secara meluas diseluruh wilayah. Seiring dengan perkembangan waktu, pertumbuhan lalu lintas yang menyebabkan adanya beban berulang dan adanya perubahan kondisi lingkungan, maka kondisi perkerasan dan usia pelayanannya semakin berkurang dari semula. Konstruksi jalan mengalami perubahan fisik, dimulai dari kerusakan kecil sampai dengan kerusakan yang menyebabkan kondisi jalan tidak memadai dan mengakibatkan kinerja jalan semakin menurun, sehingga untuk mempertahankan kinerja jalan tersebut perlu dilakukan penanganan yang tepat secara komprehensif dan terus menerus agar kinerja jalan pada akhir umur dapat dipertahankan pada suatu kondisi tertentu sesuai dengan perencanaan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) harus dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang ada. Sebagai contoh, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi memerlukan angkutan yang membawa hasil industri dengan tonase berat, sehingga mesti didukung prasarana jalan yang tersedia. Jika diangkut dengan truk-truk bertonase kecil maka biaya operasinya akan tinggi. Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum harus dapat membangun jalan sesuai standar yang diharapkan karena infrastruktur dapat menjadi pendorong dan penggerak ekonomi.

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketepatan pelaksanaan anggaran merupakan syarat mutlak bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan program kerja yang disusun secara sistematis diharapkan pelaksanaan tahapan-tahapan juga dilakukan dengan tertib dan tepat waktu. Ketertiban dan ketepatan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan merupakan dasar dari penegakkan sistem penyelenggaraan negara yang baik.

Selanjutnya pembangunan nasional mengembangkan pembangunan di segala bidang kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di pemerintah pusat saja. Akan tetapi pembangunan tersebut diarahkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan. Lebih-lebih pada pembangunan masyarakat desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Pembangunan jalan di Indonesia sudah memasuki era jangka panjang dengan berbagai isu utama mewarnai tuntutan akan pembangunan antara lain berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan, peningkatan peran serta swasta dan perubahan orientasi peran birokrasi dalam pembangunan. Harus diakui bahwa pembangunan jaringan jalan telah memberikan dampak pada banyak sendi kehidupan (sosial, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya). Dan tidak sedikit pula investasi yang telah dikeluarkan untuk pengembangan jaringan jalan tersebut. Tugas Departemen Pekerjaan Umum adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian

urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan program pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi bidang pekerjaan umum sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri PU No.57/PRT/1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, dan Keputusan Menteri PU No.58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan untuk mencapai optimasi pendayagunaan sumber daya dan jaminan mutu. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan keterlibatan masyarakat dan dengan adanya perkembangan otonomi

daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Undang-Undang 1 Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan. Didalam studi ini adalah untuk memberikan alasan-alasan objektif mengapa kinerja Dinas Pekerjaan Umum itu penting diteliti.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kota penghubung antara kabupaten yang lainnya, Oleh karena itu sarana dan prasarana perlu diperhatikan untuk kelancaran distribusi. Menurut undang-undang No. 38 tahun 2004 bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat pembangunan nasional. Dan untuk terpenuhinya peranan jalan, maka pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan dan memperbaiki semua jalan yang ada di wilayah kabupaten masing-masing.

Definisi pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga

umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan (SKPD) yang merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Sleman yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Alasan-alasan objektif mengapa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman itu penting untuk diteliti :

- a. Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan program-program pemerintah dalam memelihara jalan yang ada di Kabupaten Sleman.
- b. Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Bidang Bina Marga melakukan pemeliharaan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Sleman .
- c. Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman menyelenggarakan pemeliharaan jalan untuk keselamatan pengendara bermotor.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman memiliki sebuah program yang bernama "Pemeliharaan jalan dengan indikator kinerja Tingkat pemeliharaan jalan", didalam program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman akan terlaksananya pemeliharaan jalan disetiap kecamatan yang ada agar tidak ada jalan-jalan yang rusak dan sesegera mungkin akan dilakukan perbaikan oleh Dinas/Instansi tersebut. Program yang telah direncanakan tersebut diharapkan akan berhasil

untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Ir Nurbandi mengatakan, "jalan yang rusak itu dengan rincian rusak sedang sepanjang 351,55 Km, rusak 299,10 Km dan rusak berat 40,38 Km. Sedangkan jalan yang baik hanya 394,10 Km. Untuk memperbaiki supaya jalan di Sleman bagus dibutuhkan anggaran minimal sebesar Rp 50 miliar per tahunnya". "Anggaran yang ada di Sleman ini masih cukup jauh dari angka standar minimal. Sehingga tidak heran jika jalan-jalan di Sleman banyak yang berlubang dan rusak. Karena anggarannya tidak cukup untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak," kata Nurbandi didampingi Kepala Bidang Bina Marga Mirza Anfansury ST MT¹

¹ <http://kriqia.com/anggaran-minim-jalan-di-sleman-masih-rusak.html> diakses pada 23 april 2014

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah dan pembatasan masalah.

Berdasarkan latar belakang dan persoalan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program Pemeliharaan jalan tahun 2013?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program Pemeliharaan jalan tahun 2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program pemeliharaan jalan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan kepada ilmu pemerintahan (teoritis) karena penelitian ini memberikan penjelasan tentang Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program Pemeliharaan jalan dan jembatan dengan indikator kinerja Tingkat pemeliharaan jalan.
2. Penelitian ini memberikan sumbangan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (praktis) karena penelitian ini memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program Pemeliharaan jalan dengan indikator kinerja Tingkat pemeliharaan jalan.

E. Kerangka Teori

1. Organisasi

Organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut. sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Setiap organisasi baik formal ataupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Untuk itulah setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan organisasi. Sistem pada organisasi

itu dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, prosedur dan peraturan lainnya.

Pada organisasi yang paling kecil, yaitu keluarga, pada dasarnya juga memiliki peraturan-peraturan sekalipun tidak sekomplek peraturan pada organisasi besar. Sistem yang dianut oleh organisasi inilah yang mengatur setiap gerak dan tindak tanduk organisasi. Pada organisasi monarki, sistem itu berupa kekuasaan mutlak yang berada ditangan raja. Raja mengatur segala aspek dan membuat peraturan-peraturan. Raja berperan sebagai pusat (sentral) segala aspek didalam organisasi kerajaan. Organisasi demikian dapat disebut dengan organisasi yang diatur oleh orang (*ruled by person*). Pada organisasi yang maju, segala aspek didalam organisasi diatur oleh sistem. Sehingga disebut dengan organisasi yang *ruled by system*. Sekalipun sistem itu dibuat oleh orang perorang, namun setiap orang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti sistem tersebut. Apabila sistem tersebut dipandang perlu untuk diperbaiki, maka sistem tersebut bisa diperbaiki agar kembali sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. Organisasi yang diatur oleh sistem (*ruled by sistem*), memiliki sistem yang berkesinambungan sekalipun ada orang yang keluar/masuk kedalam organisasi.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Ketentuan tentang pemerintah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No.22/1999. Berdasarkan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang no. 22/1999 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan

prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran-peran masyarakat. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu UU No.22/99 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membantu dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.²

Sedangkan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab sesuai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan pada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah :

- a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

² Dedi Sunardi, Bab D. Dadang Solihin, MA, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka

- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang didasarkan didaerah kabupaten dan daerah kota.
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Pemerintah daerah dipimpin oleh Gubernur yang bertanggung jawab pada DPRD Provinsi, sedangkan kedudukannya sebagai wakil pemerintah, Gubernur bertanggung jawab pada Presiden. Sedangkan untuk otonomi di daerah kabupaten dipimpin oleh bupati atau walikota yang bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/ DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Bupati sebagai unsur pemerintah daerah dan pimpinan daerah mempunyai tugas melaksanakan kewajiban umum dan menyelenggarakan segala kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembinaan yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh bupati adalah:

- a. Pimpinan daerah harus membina seluruh perangkat daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan kewenangan daerah
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengadilan penyelenggaraan kewenangan daerah.
- c. Pengkoordinasian tugas instansi vertikal yang ada di daerah.

Didalam sebuah penyelenggaraan pemerintah daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah dituntut untuk dapat berusaha semaksimal mungkin menggunakan kemampuan yang telah dimiliki oleh daerah agar dapat menghasilkan sumber keuangan sendiri dan potensi di daerahnya tersebut termasuk didalam pemanfaatan dalam wujud pembangunan yang

nyata. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat setiap kewenangan pemerintah menjadi wewenang daerah.

3. Kinerja

a. Pengertian

Dalam bahasa Inggris padanan kata untuk istilah kinerja yakni “performance” menurut the Scribner Batam English Dictionary 1979, kinerja berasal dari kata “to perform” yang mempunyai arti beberapa istilah “entries” sebagai berikut :³

- a) Melakukan, menjalankan, melaksanakan
- b) Memenuhi atau menjalankan kewajiban dalam suatu organisasi
- c) Menggambarkan suatu karakter dalam suatu organisasi
- d) Menggambarkan dengan sarana atau alat musik
- e) Melaksanakan atau menyempurnakan tanggungjawab
- f) Melakukan usaha kegiatan dalam suatu permainan
- g) Memainkan (pertunjukan musik)
- h) Melakukan suatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin

Dalam kaitannya dengan kinerja, maka entres yang paling tepat adalah(a,b,e dan g), yakni melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.⁴

³ Suvudi Prawira Sentana “kehiikan Kinerja Karyawan” Yogyakarta:BPFE, hal. 99

Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma maupun etika.

Jadi pengertian kinerja adalah yang telah dicapai oleh seseorang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi terdapat suatu tim yang diharapkan dapat bekerjasama untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Masalah kinerja sebenarnya sangat berkaitan dengan pencapaian hasil pekerjaan. Gomes menyebut kinerja sebagai catatan *out come* yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu.⁵

Pada konteks kinerja organisasi publik, Lembaga Administrasi Negara / LAN (2000) telah mengembangkan konsep dan ukuran kinerja cukup operasional. Menurut LAN (2000), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas.⁶

b. Aspek-aspek kinerja

Penilaian terhadap bagaimana aktivitas dan proses diselenggarakan merupakan dasar yang melandasi usaha untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Pengukuran kinerja aktivitas didisain untuk menilai bagaimana aktivitas tersebut dilaksanakan dan hasil yang diperoleh. Saat ini ukuran kinerja menduduki peranan penting dalam organisasi.

⁵ Gomes, F. Cardoso, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, hal.87

⁶ Sudarmono, 2000 "Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 76

Kinerja atau prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :⁷

1. Aspek Produktivitas (Productivity)

Perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output) apabila keluaran atau hasilnya lebih besar daripada masukan atau ongkosnya maka kondisi ini disebut efisien

2. Aspek Kualitas (Quality of Service)

Merupakan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada resepiennya. Dengan kata lain menyangkut aspek quality of service ada lima dimensi kualitas pelayanan menurut Philip Kotler antara lain sebagai berikut:⁸

a. Dapat diraba

Yaitu penampilan fisik, peralatan, personal, dan media komunikasi

b. Andal

Yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan cepat dan terpercaya

c. Ketanggapan

Yaitu kemampuan untuk membantu masyarakat dan memperbaiki jasa cepat tanggap

d. Keyakinan

Yaitu keyakinan masyarakat terhadap penyelesaian pekerjaan

e. Empati

Yaitu syarat untuk peduli memberi perhatian bagi masyarakat

⁷ Ulung Pribadi 1999 "Diktat Pengembangan Organisasi Publik". Yogyakarta : UMY, hal. 65

⁸ | Supranto & Philip Kotler 1994 "Penaukuran Tinakat Kepuasan Pelanggan" , hal. 111

3. Responsivitas (Responsiveness)

Dapat diartikan sebagai daya tanggap atau respon para pengelola organisasi terhadap kebutuhan dan keinginan para klien atau masyarakat sasaran. Daya tanggap ini maksudnya sebagai respon terhadap kebutuhan klien dan penerapan peraturan yang benar.

4. Responsibilitas (Responsibility)

Dapat diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan keahlian yang dimiliki oleh para pengelola organisasi. Program yang baik disini dimaksudkan dalam arti luas sebagai kemantapan sistem pekerjaan dan keahlian yang dimiliki oleh para pengelola organisasi.

5. Profesionalisme (Professionalism)

Aspek ini merujuk pada sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis yang harus dimiliki oleh para pengelola organisasi. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi, karena semakin bertambahnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu teknologi.

6. Akuntabilitas (Accountability)

Dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban dari pengelola Organisasi terhadap apa apa yang telah dilakukan kepada stakeholder (pihak pihak yang berkepentingan). Hal ini mengarah pada pengertian bahwa segala tindakan Organisasi akan dinilai dan di Evaluasi oleh kalangan yang terkait atau menilai dengan kepentingan Organisasi itu.

Ada tiga konsep yang dapat digunakan mengukur kinerja organisasi publik, yaitu :⁹

- 1) Responsivitas (responsiveness), yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Responsibilitas (responsibility), yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit.
- 3) Akuntabilitas (accountability), yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.

Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan akuntabilitas serta jembatan antara perencanaan strategik dan akuntabilitas. Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti bukti atau indikator indikator atau ukuran ukuran capaian yang mengarah pada pencapaiannya misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja sulit dicari pembenaran yang logis untuk pencapaian misi organisasi/instansi. Sebaliknya dengan disusun perencanaan strategik yang jelas, perencanaan operasional dapat diukur, maka diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak.

⁹ Moeberiono, 2012. *Indikator Kinerja Utama*. PT Grafindo Persada, Jakarta, hal.162

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pemerintahan

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan *input* bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Berbeda dengan organisasi privat, pengukuran kinerja organisasi publik sulit dilakukan karena belum menemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional.

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah

penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Organisasi publik memiliki *stakeholders* yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi privat. *Stakeholders* dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu sama lain. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para *stakeholders* juga berbeda-beda. Para pejabat birokrasi, misalnya, seringkali menempatkan pencapaian target sebagai ukuran kinerja sementara masyarakat pengguna jasa lebih suka menggunakan kualitas pelayanan sebagai ukuran kinerja.

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi:¹⁰

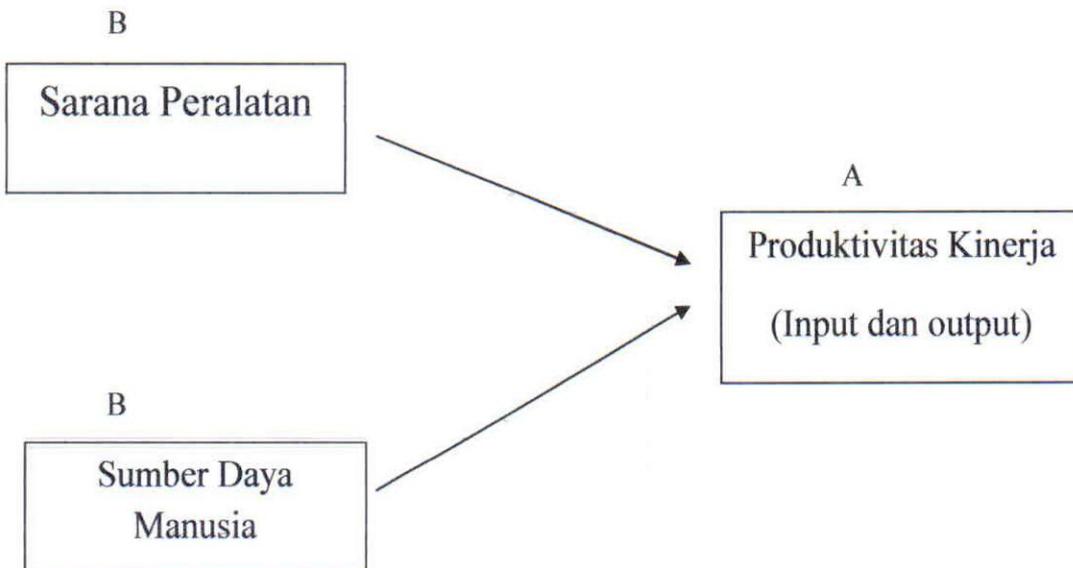
- 1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.
- 2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
- 3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.
- 4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.

¹⁰ Gary Desler, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia PT INDEKS, Jakarta Barat, hal. 222

- 5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
- 6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya.

Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Kemudian organisasi publik memiliki stakeholders yang lebih banyak dan kompleks daripada organisasi privar atau swasta. Stakeholders dari organisasi publik sering kali memiliki kepentingan yang berbenturan satu sama lainnya. Akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders akhirnya juga berbeda-beda, banyak birokrasi menempatkan pencapaian target sebagai ukuran kinerja, sedangkan masyarakat sebagai pengguna jasa lebih suka kualitas layanan sebagai ukuran kinerja.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



A. Kinerja Dinas Pekerjaam Umum Dan Perumahan Dalam Program Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Sleman.

1. Masukan (Input)
2. Keluaran (Output)

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Dalam Program Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Sleman.

1. Sarana Peralatan
2. Sumber Daya Manusia

F. Definisi Konsepsional

Konsep merupakan generalisasi dari sebuah fenomena tertentu, sehingga dapat dipahami dan dimengerti sehingga tidak terjadi kesalahpahaman arti dari masing-masing variabel.

1. Organisasi

Organisasi adalah alat saling berhubungan dari satuan-satuan kerja yang memberikannya kepada orang yang ditempatkannya didalam struktur kekuasaan atau kewenangan sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh badan usaha.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak yang baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan perundang-undangan.

3. Kinerja

Kinerja adalah suatu tampilan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan prestasi atas hasil yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya

G. Definisi Operasional

A. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Dalam Program Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Sleman.

1. Masukan (Input)
2. Keluaran (Output)

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Pembangunan Dalam Program Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Sleman

1. Sarana Peralatan
2. Sumber Daya Manusia

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud ingin menelaah dan mencermati lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam memperbaiki jalan yang ada di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan kuantitatif deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Sleman khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Alasan dilakukannya penelitian di Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam pemeliharaan jalan-jalan yang rusak.

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sehingga informasi yang ada dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan. Data primer tersebut diperoleh langsung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literature, yaitu dari buku-buku panduan, internet, media massa baik cetak maupun elektronik, arsip-arsip, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah para aparat yang ada di Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat Di lokasi penelitian

b. Wawancara

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dilakukan berulang pada informan yang sama yaitu aparat pelaksana, masyarakat penerima dan masyarakat penerima pelayanan. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan rinci dan mendalam.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Winarno Surachmad, penelitian yang bersifat kualitatif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada.¹¹ Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan menggali data baik itu berupa pendapat dari yang diwawancarai ataupun dari dokumen yang mendukung pendapat tersebut.

¹¹ *Ibid*, hal.62.